



Implementasi Akuntansi Manajemen untuk efisiensi Anggaran Sektor Publik

Gaitsa Zahira Shopa^{1*}, Hirzah Syakira², Hunafaa Zahara³, Nadine Namira Zalfa⁴

¹⁻⁴ Universitas Budi Luhur, Indonesia

Alamat: Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260

Korespondensi penulis: gaitzahirashop85@email.com*

Abstract. Efficient budget management in the public sector requires reliable and relevant information. In this context, management accounting plays a crucial role not only as a financial recording tool but also as a support system for planning, controlling, and evaluating organizational performance. This article explores how management accounting can be implemented to help government institutions and non-profit organizations use public resources effectively. The study uses a descriptive qualitative approach by reviewing relevant academic literature. Findings indicate that a well implemented accounting system can enhance transparency, improve accountability, and reduce waste as well as the risk of budget misuse. Moreover, the financial and non-financial information it provides supports data-driven decision-making processes. Successful application of management accounting depends on strong leadership commitment, competent human resources, and the adoption of good governance principles. Therefore, management accounting serves not only as an administrative necessity but also as a foundational tool for delivering high-quality and trustworthy public services.

Keywords: Efficiency; Governance; Management accounting; Public budget; Transparency

Abstrak. Pengelolaan anggaran yang efisien di sektor publik membutuhkan dukungan informasi yang akurat dan relevan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen memainkan peran penting, tidak hanya sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai penunjang dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Artikel ini mengulas bagaimana akuntansi manajemen dapat diterapkan untuk membantu instansi pemerintah dan organisasi nirlaba menggunakan sumber daya secara tepat guna. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah literatur dari berbagai sumber ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan secara baik dapat mendorong transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, informasi yang dihasilkan dari sistem ini juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Penerapan akuntansi manajemen yang efektif memerlukan komitmen pimpinan, kualitas sumber daya manusia yang kompeten, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, akuntansi manajemen tidak hanya mendukung aspek administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Kata kunci: Akuntansi manajemen; Anggaran public; Efisiensi; Tata Kelola; Transparasi

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting. Secara sederhana, implementasi dapat dipahami sebagai langkah nyata dalam merealisasikan kebijakan atau keputusan yang telah dirumuskan, seperti undang-undang, peraturan daerah, atau kebijakan pemerintah lainnya. Dalam pandangan Wahab (2000), implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan, tetapi juga mencakup dampak atau pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap kondisi yang ingin diubah.

Van Horn dalam Wahab (2000) menyatakan bahwa implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan dari individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk mencapai hasil sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Proses ini baru bisa berjalan efektif jika tujuan kebijakan telah diterjemahkan ke dalam program-program kerja yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti potensi risiko, peluang, serta keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, peran para pemangku kepentingan menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar mewakili kepentingan bersama.

Seiring dengan itu, akuntansi publik juga memiliki peran krusial dalam mendukung jalannya kebijakan pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan publik. Akuntansi publik merupakan proses sistematis yang mencakup pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal, serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana publik (Ratmono & Sholihin, 2015; Erlina et al., 2015).

Dana publik sendiri berasal dari kontribusi masyarakat dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk lembaga negara, organisasi pelayanan publik, hingga lembaga sosial. Dalam akuntansi sektor publik, informasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat finansial, melainkan juga mencakup data non-keuangan yang relevan. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan kebijakan, serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Proses akuntansi sektor publik melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan pencatatan data, pengklasifikasian transaksi, hingga analisis yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi alat penting dalam menilai seberapa efektif dan efisien pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Berbicara mengenai efisiensi, konsep ini berkaitan dengan bagaimana suatu kegiatan dijalankan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Semakin sedikit tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tertentu, maka proses tersebut bisa dikatakan efisien. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan tepat dan tanpa pemborosan.

Beberapa ahli turut memperkaya pemahaman kita mengenai efisiensi. S. P. Hasibuan, misalnya, memandang efisiensi sebagai perbandingan terbaik antara input dan output, untuk mencapai hasil maksimal dari sumber daya terbatas. Mulyamah menyoroti pentingnya membandingkan antara perencanaan dan realisasi penggunaan sumber daya. Sedangkan

Mulyadi menekankan efisiensi sebagai cara kerja yang cermat dan tidak menyia-nyiakan waktu, tenaga, maupun biaya.

Melalui pemahaman tentang implementasi kebijakan, akuntansi publik, dan efisiensi, kita dapat melihat adanya hubungan erat antar ketiganya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika kebijakan dijalankan secara efisien dengan dukungan data akuntansi yang akurat dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan akan semakin kuat, dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi sektor publik suatu bidang yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan barang dan layanan publik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Menurut Mardiasmo (2015:14), akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik untuk pemerintah sebagai pengelola atau sebagai informasi bagi masyarakat.

Akuntansi sektor publik adalah serangkaian proses yang dimulai dari pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, serta analisis, dan menghasilkan laporan keuangan dalam suatu bisnis/badan/organisasi, baik milik swasta maupun publik, yang kemudian akan digunakan untuk memberikan informasi keuangan dan membantu pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan, selain itu juga berfungsi sebagai alat informasi masa lalu dan masa depan, baik dalam bentuk data keuangan maupun non-keuangan, yang penting bagi pihak internal organisasi untuk mencapai tujuan publik dan memastikan keterbukaan serta akuntabilitas kepada masyarakat.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup semua lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba. Sektor publik juga memiliki jangkauan yang lebih luas dan rumit dibandingkan sektor swasta. Secara kelembagaan, sektor publik mencakup lembaga pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah, perusahaan publik, baik BUMN maupun BUMD, organisasi dan lembaga, organisasi politik dan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dinas kesehatan, perguruan tinggi, dan organisasi nirlaba lainnya.

Peran dan Tujuan Akuntansi Manajemen Sekotr Publik

Akuntansi manajemen di sektor publik berperan menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Informasi ini

sangat penting agar fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dapat berjalan optimal sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik meliputi:

a) Perencanaan Strategi dan Penganggaran

Membantu manajemen menyusun dan menyesuaikan anggaran berdasarkan data biaya yang akurat, sehingga alokasi sumber daya lebih efisien dan tepat guna.

b) Penetapan dan Pengendalian Biaya

Meliputi identifikasi, pencatatan, analisis, pengurangan, dan pelaporan biaya. Proses ini memastikan setiap pengeluaran tercatat dan dianalisis untuk mendukung efisiensi serta mencegah pemborosan.

c) Penilaian Investasi

Menggunakan analisis biaya-manfaat dan biaya-efektivitas untuk memastikan bahwa setiap proyek atau investasi publik memberikan hasil optimal sesuai anggaran.

d) Penentuan Tarif Layanan Publik

Menyediakan informasi biaya sebagai dasar penetapan tarif layanan publik agar tetap wajar, terjangkau, dan sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan.

e) Penilaian Kinerja

Membantu menyusun indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan.

Tujuan Akuntansi Manajemen Sektor Publik

- a) Menyediakan data yang dibutuhkan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya publik secara bijaksana, hemat, dan sesuai arah kebijakan organisasi.
- b) Memberikan informasi yang mendukung pimpinan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di bawah kewenangannya. Selain itu, data ini turut berperan dalam membantu pemerintah menjelaskan hasil kinerjanya kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban publik.
- c) Mengarahkan alokasi sumber daya agar sesuai dengan skala prioritas kebijakan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, akuntansi manajemen menjadi dasar penting dalam menciptakan organisasi sektor publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi

Lembaga keuangan yang memberikan layanan di bidang keuangan dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk organisasi. Suatu organisasi dapat digambarkan sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntansi berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang bersifat historis maupun proyeksi. Informasi ini menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan dan anggaran, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Setiap organisasi umumnya melalui dua tahap dalam perencanaan strategis, yaitu:

- a) Menetapkan jenis produk yang akan diproduksi atau layanan yang akan disediakan.
- b) Merancang strategi pemasaran atau proses produksi guna memastikan produk atau layanan tersebut dapat menjangkau target audiens dengan tepat.

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa depan. Setiap organisasi memiliki sistem perencanaan yang berbeda, tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang memengaruhinya. Semakin besar ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi, maka semakin kompleks dan maju sistem perencanaan yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Adanya perencanaan yang matang maka perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan baik. Tujuan dan manfaat utama yang ingin dicapai melalui perencanaan biaya produksi antara lain sebagai berikut:

- a) Mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan.
- b) Menjalankan proses produksi perusahaan dengan tingkat efisiensi yang optimal.
- c) Memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal.
- d) Meningkatkan jumlah produksi dengan menekan biaya serendah mungkin.
- e) Menghasilkan produk dengan biaya yang kompetitif agar mampu bersaing di pasar.

Akuntansi sebagai Alat Pengendalian Akuntansi

Akuntansi tidak hanya berfungsi mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian untuk merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas ekonomi organisasi. Melalui akuntansi pertanggungjawaban, organisasi dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi), di mana setiap manajer bertanggung jawab atas kinerja unitnya.

Proses pengendalian meliputi penyusunan anggaran sebagai standar, pemantauan realisasi, analisis penyimpangan, dan tindakan korektif untuk memastikan aktivitas sesuai rencana. Sistem ini membantu mengendalikan biaya, pendapatan, dan investasi secara efektif serta mendukung desentralisasi pengambilan keputusan.

Tujuan utama akuntansi sebagai alat pengendalian adalah:

- a) Menjamin keandalan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.
- b) Mencegah dan mendeteksi kecurangan melalui pengendalian internal.
- c) Mengendalikan pengeluaran agar sesuai anggaran dan mencegah pemborosan.
- d) Meningkatkan efisiensi operasional dengan memonitor penggunaan sumber daya.
- e) Menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Secara sistematis, pengendalian melalui akuntansi dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun laporan pertanggungjawaban, menganalisis penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan untuk menjaga kinerja organisasi tetap optimal.

Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik

Perencanaan dan pengendalian manajerial adalah fungsi penting dalam manajemen organisasi sektor publik yang bertujuan menjamin pelayanan efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat. Proses perencanaan dimulai dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, kemudian disusun rencana jangka panjang, menengah, dan pendek yang dituangkan dalam dokumen seperti Renstra dan Renja. Indikator Kinerja Utama (IKU) dibuat sebagai tolok ukur pencapaian, dan alokasi anggaran serta sumber daya dilakukan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan penting untuk memastikan program sesuai kebutuhan publik.

Pengendalian manajerial meliputi pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian pelaksanaan rencana agar sesuai sasaran, dengan menggunakan laporan berkala dan evaluasi berbasis hasil. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi harus diterapkan agar pengelolaan berkualitas dan berintegritas. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi dan kebijakan yang ada, sehingga organisasi sektor publik dapat menjadi responsif, efisien, dan berorientasi hasil.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana dipertimbangkan sempurna. Secara etimologis, konsep implementasi menurut kamus Webster

adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu mengimplementasi. Dalam Kamus Besar Webster, implementasi berarti menyediakan sarana untuk mencapai (menyediakan sarana pencapaia sesuatu) dan memberikan efek praktis (memiliki dampak/gambar) mempengaruhi sesuatu). Untuk melakukan segala cara untuk melakukan pengaplikasiannya. Pelaksanaannya adalah penyediaan sarana untuk mencapai sesuatu yang memiliki dampak atau efek pada sesuatu. Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan akibat yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam kehidupan bernegara (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan perencanaan strategi dalam organisasi dengan menggunakan informasi akuntansi sebagai alat bantu.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur sistematis, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai jurnal ilmiah yang relevan. Teknik ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta temuan-temuan penting yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan analisis konten, yang berfokus pada pemahaman makna dari isi jurnal yang telah ditelaah.

Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dan analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari jurnal. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat generalisasi, melainkan untuk menemukan makna dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

Menurut Sugiyono, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan mengkaji suatu fenomena apa adanya, sedangkan menurut Singarimbun dan Effendy (1998), penelitian deskriptif bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan kondisi tertentu secara cermat. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah menyajikan informasi secara objektif dan faktual berdasarkan hasil analisis terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang telah dikumpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi manajemen sektor publik adalah sistem yang memberikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajer di organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintah, yayasan, rumah sakit, sekolah, dan organisasi nirlaba untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, serta tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya publik.

Dalam akuntansi sektor publik, data yang digunakan adalah data akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi historis dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan yang penting bagi pihak internal organisasi untuk mencapai tujuan publik. Juga bertujuan memberikan transparansi kepada masyarakat terkait penggunaan dana publik (Menurut Ratmono & Sholihin, 2015; Erlina et al., 2015).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi sektor publik memegang peran sentral sebagai sumber informasi yang menggambarkan bagaimana suatu entitas memperoleh, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangannya. Informasi ini mencakup asal-usul dana, cara pembiayaan kegiatan operasional, serta bagaimana kebutuhan kas dapat dipenuhi oleh organisasi publik. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan data penting untuk mengevaluasi sejauh mana suatu entitas mampu menjalankan kewajiban dan memenuhi komitmennya secara berkelanjutan.

Laporan ini juga menyajikan kondisi keuangan suatu entitas secara menyeluruh, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi selama periode tertentu. Informasi yang disajikan dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai kinerja lembaga publik, khususnya dalam penyediaan layanan, efisiensi pelaksanaan program, serta pencapaian tujuan institusional. Hal ini menjadikan laporan keuangan tidak hanya sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan yang strategis.

Adapun fungsi utama dari laporan keuangan sektor publik antara lain:

- a) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*): Menunjukkan bagaimana organisasi mematuhi regulasi serta mengelola dana publik dengan penuh tanggung jawab.
- b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif: Menyediakan catatan atas kegiatan yang telah dilakukan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui sejauh mana dana publik digunakan secara efektif.
- c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi: Menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja serta pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang.
- d) Kelangsungan Organisasi (*Viability*): Menilai keberlanjutan finansial organisasi dalam jangka panjang.

- e) Hubungan Masyarakat (*Public Relations*): Berfungsi sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik.
- f) Sumber Fakta dan Data: Memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif yang akurat sebagai dasar analisis dan evaluasi.

Akuntansi sektor publik memiliki peran krusial dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk pengelompokan akun yang sesuai standar, serta prosedur pencatatan dan penjurnalan yang sistematis. Seluruh proses ini mencerminkan aktivitas keuangan dalam organisasi sektor publik, seperti kegiatan interpretasi keuangan, pengelolaan kas, dan pelaporan. Standar yang digunakan dalam akuntansi sektor publik telah dirancang dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip internasional agar dapat diterapkan secara konsisten dan dapat dibandingkan lintas negara maupun yurisdiksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem akuntansi yang fungsional, stabil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi akuntansi di sektor publik mengacu pada penggunaan sistem pencatatan keuangan oleh instansi pemerintah dan lembaga yang melayani masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan secara transparan, serta menyampaikan informasi keuangan secara akurat kepada publik. Keberadaan sistem ini sangat penting untuk menjamin keandalan data keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, peningkatan akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan akuntansi sektor publik:

Meningkatkan Transparansi dan Tanggung Jawab Publik

Sistem akuntansi yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga memperkuat transparansi. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik dikelola, yang mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab.

Menyediakan Laporan Keuangan yang Andal

Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi sektor publik disusun secara sistematis dan mengacu pada standar internasional. Ini membuat informasi tersebut mudah dipahami oleh berbagai pihak dan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Mendukung Efisiensi dan Kinerja Fiskal

Penerapan akuntansi yang baik membantu pemerintah mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi keuangan. Informasi keuangan yang jelas mempermudah perencanaan dan pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada stabilitas ekonomi.

Menekan Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran

Dengan adanya sistem pelaporan yang rapi dan transparan, peluang terjadinya manipulasi data atau penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Mempermudah Proses Audit dan Pengawasan

Informasi akuntansi yang tersedia memudahkan proses audit oleh lembaga internal maupun eksternal. Hal ini memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dikontrol secara objektif dan masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan data yang faktual dan akurat.

KESIMPULAN

Akuntansi manajemen sektor publik memegang peran sentral dalam mendukung terciptanya tata kelola organisasi publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Melalui penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan, akuntansi manajemen membantu proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi agar tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal. Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai instrument strategis untuk pengendalian biaya, penilaian investasi, penentuan tarif layanan, serta penilaian kinerja setiap unit organisasi.

Implementasi akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasi sektor publik memungkinkan pembagian tanggung jawab yang jelas pada setiap pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi, sehingga pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terfokus dan objektif. Selain itu, akuntansi juga berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, mencegah terjadinya pemborosan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Keberhasilan penerapan akuntansi manajemen di sektor publik sangat bergantung pada komitmen pimpinan, kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Dengan demikian,

akuntansi manajemen sektor publik tidak hanya menjadi kewajiban *administrative*, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Amani, T. (2021). Akuntansi sektor publik.
- Anggara Putra, R. (2024). Akuntansi manajemen sektor publik. Rian Anggara Putra.
- Belinda, A. P., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 1(1), 58–77.
- Defitri, S. Y., Suciati, F., Yulia, R., Adhi, D. K., Hertati, L., Kunda, A., ... Safkaur, O. (2022). Akuntansi sektor publik. PT Global Eksekutif Teknolog.
- Gumanti, T. A., & Utami, E. S. (2002). Bentuk pasar efisiensi dan pengujinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 54–68.
- Hariadi. (2002). Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Kristen Maranatha. <http://repository.maranatha.edu/24/1/AK>
- Hehanussa, S. J. (2024). Akuntansi sektor publik. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kamal. (2021). Akuntansi sektor publik: Pengertian menurut ahli, tujuan, jenis. <https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/>
- Karang, T. D. D. D. (2025). eJournal Administrasi Publik, 13(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Putri, J. (2017). Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan strategis. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*, 1(2), 79–98.
- Siregar, K. H. (2020). Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 2(2), 1–17.
- Ulfatimah, H. (2020). Implementasi tabungan Baitullah IB Hasanah dan variasi akad pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru [Disertasi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yusra, M. (2016). Modul akuntansi sektor publik [Bahan ajar]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh. <https://repository.unimal.ac.id/>